



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PENINGKATAN KERJA SAMA INDONESIA - JEPANG DALAM MEMAJUKAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN GLOBAL

Aryojati Ardipandanto
Analisis Legislatif Ahli Muda
aryojati.ardipandanto@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Tahun 2023 Jepang dan Indonesia menyambut peringatan terjalannya 65 tahun hubungan diplomatik sejak penandatanganan Perjanjian Perdamaian Indonesia-Jepang pada 20 Januari 1958. Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Osaka dan Ritsumeikan University menyoroti peran Indonesia dan Jepang dalam menguatkan perdamaian global yang didorong oleh kesamaan prinsip dan nilai yang dianut oleh kedua negara. Konjen RI di Osaka bekerja sama dengan Ritsumeikan University untuk pertama kalinya berkolaborasi menyelenggarakan seminar publik bertajuk *Indonesia-Japan Cooperation in Promoting Peace and Security* secara luring di Ritsumeikan University, Kinugasa Campus, Kyoto, pada Kamis, 15 Juni 2023. Penyelenggaraan seminar dalam kerangka 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara penting dan tepat dilaksanakan mengingat hubungan signifikan kedua negara di berbagai bidang, mulai dari kerja sama ekonomi, sosial, dan budaya, hingga mendukung perdamaian dan keamanan di kawasan.

Seminar menghadirkan tiga panelis, yaitu Konjen RI Osaka, Diana ES Sutikno, yang membahas mengenai *Indonesia-Japan Cooperation in Promoting Peacebuilding*; Jun Honna dari Ritsumeikan University membahas topik *Reaffirming the Central Role of Indonesia in Japan's Maritime Non-traditional Security Cooperation in Southeast Asia*; dan Lina Alexandra dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta mengangkat topik *Promoting Indonesia-Japan Cooperation in Advancing Culture of Peace*. Diskusi panel dimoderatori oleh Kenki Adachi dari Ritsumeikan University.

Seminar tersebut membahas peran penting Jepang dan Indonesia dalam memastikan perdamaian dan keamanan internasional. Saat KTT G-7 di Hiroshima pada 19-21 Mei 2023, Presiden Joko Widodo dan PM Fumio Kishida bersepakat untuk terus meningkatkan kerja sama kedua negara dan menjembatani kepentingan negara anggota G-7 dan negara-negara selatan. Seminar dilaksanakan sebagai rangkaian peringatan 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang dan dihadiri oleh sekitar 50 orang peserta yang terdiri dari akademisi, pelajar Indonesia, Jepang, dan Internasional.

Penekanan pentingnya kerja sama Indonesia-Jepang dalam mewujudkan keamanan global dalam seminar ini dilakukan dengan membahas kembali peran Indonesia dan Jepang. Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang pasukan terbesar ke-8 dari 125 negara dengan lebih dari 27.700 personil dan peralatan militer yang ditempatkan di 9 misi UNPKO, serta memiliki pengalaman dalam memajukan *peace building* (bina damai) dan demokrasi, menempatkan pada posisi tepat dan kredibel dalam memainkan peran kunci di bidang perdamaian. Di lain sisi, Jepang sebagai negara pada jajaran lima besar penyumbang dana tetap di PBB dan 10 besar negara kontributor pendanaan pada *peace building fund*, dan peran kepemimpinan Jepang pada Komisi Bina Damai PBB, juga menjadi modalitas penting bagi peran aktif Jepang dalam memajukan isu-isu bina damai di tingkat internasional.

Hal selanjutnya yang digarisbawahi adalah adanya pembahasan mengenai peluang peningkatan kerja sama Indonesia dan Jepang di bidang perdamaian dan stabilitas internasional, khususnya pada kerja sama keamanan maritim. Doktrin Poros Maritim Indonesia dipandang sangat selaras dengan komitmen Jepang dalam membangun tata kelola keamanan maritim di perairan Asia Tenggara.

Disebutkan pula bahwa tahun 2023 merupakan tahun yang penting bagi kedua negara. Selain peringatan 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang, kedua negara juga menjalankan peran penting dalam hubungan luar negeri di kawasan dan dunia, di mana Indonesia dipercaya sebagai Ketua ASEAN dan Jepang sebagai Presiden G-7. Selain itu, tahun 2023 juga menandai *milestone* 50 tahun hubungan ASEAN dan Jepang.

Atensi DPR

Komisi I DPR perlu menindaklanjuti aspek penting terkait pertahanan dan keamanan global yang dibahas dalam Seminar Publik *Indonesia – Japan Cooperation in Promoting Peace and Security*. Aspek tersebut adalah adanya penegasan pada kesepahaman tentang tata kelola keamanan maritim antara kedua negara. Komisi I DPR sebaiknya menggunakan momentum ini untuk meningkatkan kerja sama dengan Jepang dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Komisi I DPR perlu mendorong Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang pengadaan alat peralatan pertahanan untuk keamanan wilayah laut dengan sistem kerja sama alih teknologi, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Komisi I DPR juga perlu mendorong kerja sama Indonesia-Jepang yang diarahkan pada penanggulangan ancaman militer maupun nonmiliter seperti terorisme, pencurian sumber daya alam, pelanggaran batas wilayah, pembajakan baik laut maupun udara, bencana alam, narkoba, spionase, *cyber war*, *proxy war*, penyelundupan, imigran gelap, wabah penyakit, konflik terbuka atau perang konvensional, dan kriminal lintas batas lainnya.

Sumber

antaranews.com, 16 Juni 2023;
kemlu.go.id, 16 Juni 2023;
metrotvnews.com, 16 Juni 2023; dan
UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.